

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Archer, C. (2011). *International Organization* hlm.68-83. Routledge.

Ashari, K. (2015). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Badudu, Y. (1994). *Kamus Bahasa Indonesia* hlm.54. Jakarta: Sinar Harapan.

Berman, J., & Marshall, P. *Evaluation of The International Organization For Migration and Its Effort to Combat Human Trafficking*. Report 11/2010-Evaluation, Publikasi.

Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi, 2014*. Hlm.222 .

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Havid, A. S. *Pengungsi dalam Rangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang, Protecting Refugee, A Field Guide for NGO's* hl.125.

Jr, J. E. (1986). *Contending Theories of International Relation: A Comprehensive Survey* hlm 419. New York: Longman.

K.J.Holsti. (1988). *Politik Internasional (diterjemahkan oleh M.Tahrir Azhari)* hlm.652-653. Jakarta: Erlangga.

Kartasasmita, K. (1983). *Organisasi dan Administrasi Internasional* hlm 83. Bandung: Fisip UNPAD Press.

KBBI. *Fumigasi*.

Kuhn. (1989). *The Structure of Scientific Revolution*.

Martin, L. L. (2007). *Neoliberalism, dalam International Relations Theories* Hlm.109-126. Oxford University Press.

Mas'od, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Missbach, A. (2016). *Detaining Assylum Seekers and Refugees in Indonesia*. Oxford University.

Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif* Hlm.248. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana), D. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif Hlm.57*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Natalie, C. &. (2015). *Migration Policy Service. IOM & Eurasyllum. Vol.5 Number 4*.

Rudy, T. M. (1993). *Administrasi dan Organisasi Internasional hlm 7-8*. Bandung: PT.Eresco.

Sorenson, R. J. (1999). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Subakti, J. (2010). *Kerjasama Indonesia dan IOM*. Depok: Universitas Indonesia.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dan R & D Hlm.338*. Bandung: Alfabeta.

UNHCR. (1999). *Konvensi dan Protokol tentang Status Pengungsi hlm.14*. Jakarta.

B. Undang-Undang

1945., U.-U. D. Pasal 28 H ayat 1.

Kesehatan, U.-U. n. Pasal 4.

Konstitusi International Organization For Migration.

Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 3, 5, 6, 9, 12, 18, 19, 23 (3), 24.

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Pasal 12; Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 7(1), 24, 37(c); Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 2, 3, 10, 24(2), 26; Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial.

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Pasal 12; Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 7(1), 24, 37(c); Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 2, 3, 10, 24(2), 26; Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, da.

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 6(2), 13; Konvensi Pengungsi Pasal 22.

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 6(2), 13; Konvensi Pengungsi Pasal 28, 29.

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 11: Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 10, 17, 18, 19.

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 12.

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 12; Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 24; Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Pasal 12.

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 12; Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 10, 17, 26; Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Pasal 12; Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 24, 37(c).

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 12; Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 6, 10.

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 12; Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 6, 7, 10; Konvensi Menentang Penyiksaan Pasal 2, 10; Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 24,37(c).

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 12; Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 6, 7, 10; Konvensi Menentang Penyiksaan Pasal 2, 10; Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 24,37(c).

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 4, 15.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18, 27; Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 14, 29 (d), 30; Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 13; Konvensi Pengungsi Pasal 4.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 6, 10, 18, 27; Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 6, 24, 27.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 6, 10, 18, 27; Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 6, 24, 27).

Manusia., U.-U. N. Pasal 62.

Pasal 12, International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR).

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.M.HH-11.OT.01.01TAHUN 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.

Pasal 25, Universal Declaration of Human Rights.

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.M.HH-11.OT.01.01TAHUN 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Pasal 15 Ayat 1 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Pasal 15 Ayat 1 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

C. Jurnal

Andea, R. E. (2013). Jurnal : *Peran International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Imigran Ilegal Asal Timur Tengah di Indonesia.*

Cresensia Liany Prastica Mallisa. (2017). Skripsi : *Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Imigran Gelap Asal Afghanistan di Sulawesi Selatan.*

Morradi, V. F. (2015). Jurnal : *Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka.*

Mulhadi. (2014). *Pelanggaran Hukum Nasional Indonesia yang dilakukan oleh pengungsi yang berada di Wilayah Indonesia.*

Putra, A. N. (2017). Skripsi : *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Permasalahan Migran Suriah di Jerman.*

KaniaAnjani Sudirman. (2018). Skripsi : *Upaya International Organization for Migration (IOM) Dalam Memenuhi Kebutuhan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang.*

Apriadi. (2018). Jurnal: *Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia. Studi Kasus : Rumah Detensi Imigrasi Surabaya*

D. Web

Action, C. (2006, Mei 22). *Every Country affected by human trafficking, UNODC reports.* Retrieved Maret 27, 2019, from <http://www.thefreelibrary.com/Community+Action/2006/May/22-p533>

Amr. (2016, Januari 27). *47 Imigran Afghanistan Kabur dari Rudenim Tanjungpinang*. Retrieved Maret 31, 2019, from <http://news.okezone.com/read/2016/01/27/340/1298523/47-imigran-afghanistan-kabur-dari-rudenim-tanjungpinang>

Data Deteni. (n.d.). Retrieved April 05, 2019, from Rudenim Pusat Tanjungpinang: <http://rudenimtanjungpinang.imigrasi.go.id/data-deteni/>

Hentikan Pengiriman Tenaga Kerja Perempuan. (2012, September 19). Retrieved Februari 01, 2019, from Harian Kompas: internasional.kompas.com/read/2012/09/19/07441385/twitter.com

Indonesia, I. (n.d.). *IOM di Indonesia*. Retrieved Maret 29, 2019, from <https://indonesia.iom.int/sites/default/files/January%202014%20Newsletter%20Indonesian.pdf>

Indonesia, I. *January 2014, Upaya Memerangi Penyelundupan Manusia Tahun 2013*.

Indonesia, I. O. (2009). *Annual Report*.

Indonesia, I. O. *Factsheet Pemberantasan Perdagangan Orang*. Indonesia.

IOM and Belize Anti-Trafficking Committee Launch Educational Awareness Campaign. (n.d.). Retrieved Februari 01, 2019, from <http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press0briefing-notes/pbn-2012/pbn-listing/iom-and-belize-antitrafficking-committee.html>

IOM Indonesia. (n.d.). Retrieved Desember 24, 2018, from International Organization for Migration: <http://indonesia.iom.int/sites/files/January%202014%20Newsletter%20Indonesian.pdf>

IOM. (n.d.). *Kapolri Mendukung Usaha IOM Indonesia Untuk Memberikan Pelatihan Kepada 7.000 Polwan*. Retrieved Maret 29, 2019, from International Organization for Migration: <https://indonesia.iom-int/id/kapolri-mendukung-usaha-iom-indonesia-untuk-memberikan-pelatihan-kepada-7000-polwan>

IOM, N. (n.d.). Retrieved April 03, 2019, from http://iom.or.id/newsletter/ind/RMIM%20Newsletter_Dec%202011_Bahasa_v3.pdf

Laporan Bulanan Maret 2016.

Migration, I. O. (n.d.). Retrieved Januari 30, 2019, from http://www.gugutugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=160:international-organization-for-migration&catid=66:badan-pbb&Itemid=95.

Migration, I. O. (n.d.). Retrieved Desember 24, 2018, from International Organization for Migration: <http://Iom.hom-ent.com>

Migration, I. O. (n.d.). *History*. Retrieved Maret 27, 2019, from <https://www.iom.int/iom-history>

Migration, I. O. (2008). *Pedoman Operasional Penanganan dan Pengurusan Para Imigran Liar di Indonesia*. Bali: IOM.

Migration, I. O. (n.d.). *Peningkatan Kapasitas*. Retrieved Maret 29, 2019, from <http://indonesia.iom.int/sites/default/files/January%202014%20Newsletter%20Indonesian.pdf>

Migrations, I. O. (n.d.). Retrieved Januari 30, 2019, from http://www.gugutugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=160:international-organization-for-migration&catid=66:badan-pbb&Itemid=95.

News, B. (2015, Januari 26). *UNHCR Dinilai Kecolongan Tetapkan Status Pengungsi Untuk imigran Kabur*. Retrieved Maret 31, 2019, from Bestari News: <http://bestarnews.com/index.php/2016/unhcr-dinilai-kecolongan-tetapkan-status-pengungsi-untuk-imigran-kabur/>

Novarina, F. (n.d.). *Kebijakan-Kebijakan Politik Kolonial Hindia Belanda pada Abad XIX sampai abad XX*. Retrieved November 27, 2018, from Academia: http://www.academia.edu/24449051/Kebijakan-kebijakan_Politik_Kolonial_Hindia_Belanda_pada_abad_XIX_sampai_abad_XX

Pemerintah Indonesia Tandatangani Naskah Pengaturan Kerjasama untuk Penanganan Masalah Pengungsi. (n.d.). Retrieved Januari 31, 2019, from <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pemerintah-Indonesia-Tandatangani-Naskah-Pengaturan-Kerjasama-untuk-Penanganan-Masalah-Pengungsi.aspx>

Peran IOM. (n.d.). Retrieved Desember 29, 2018, from <http://www.dw.com/id/peran-organisasi-migrasi-internasional-iom/a-2958059>

Pos, B. (n.d.). *Rudenim Resmikan Go Clinic dan Yankomas*. Retrieved Februari 13, 2019, from <https://pinang.batampos.co.id/2019/01/29/rudenim-resmikan-go-clinic-dan-yankomas/>

Potret Pengungsi Asing di Kota Angin Mamiri. (n.d.). Retrieved Maret 29, 2019, from <http://www.wapresri.go.id/potret-pengungsi-asing-di-kota-angin-mamiri/>

Sejarah IOM. (n.d.). Retrieved Desember 28, 2018, from International Organization for Migration: <http://www.iom.int/iom-history>